PERJANJIAN KINERJA (REVISI) TAHUN 2016 BPSDM PERHUBUNGAN

PERJANJIAN KINERJA (REVISI)
TAHUN 2016
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

JL. Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat

PERJANJIAN KINERJA (REVISI) TAHUN 2016
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Dr. WAHJU S. UTOMO**
Jabatan	:	**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	**BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan	:	**MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2016.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
MENTERI PERHUBUNGAN	**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
BUDI KARYA SUMADI	**Dr. WAHJU S. UTOMO** Pembina Utama (IV/e) NIP.19590906 198503 1 002

PERJANJIAN KINERJA (REVISI) TAHUN 2016
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET (TOTAL)	
				VOLUME	SATUAN
1.	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	a.	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	464.495	Orang
2.	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	b.	Jumlah lulusan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	450.655	Orang
3.	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	c.	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	138	Dokumen
		d.	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	12	Sistem
4.	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Complience and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	e.	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	60	Dokumen
		f.	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	37	Dokumen

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET (TOTAL)	
				VOLUME	SATUAN
		g.	Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	233	Dokumen
5.	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri Dan Profesional, Transparan Dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	h.	Jumlah lembaga diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	16	Lembaga
6.	Terwujudnya Kerjasama Dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Dan Profesionalisme Lembaga *International Recognition* Serta *Public Private Partnership*.	i.	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang diklat transportasi.	189	Dokumen
7.	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran Dan BMN BPSDM Perhubungan.	j.	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	86	Nilai
		k.	Target Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	95,12	(%)
		l.	Nilai Aset yang berhasil diinventarisasi.	12.211.059.603.704	Rp
8.	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya Di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	m.	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi yang dihasilkan.	26	Peraturan
9.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	n.	Jumlah sarana diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	2.067	Unit
		o.	Jumlah prasarana diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan.	436.604,2	m2

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET (TOTAL)	
				VOLUME	SATUAN
10.	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional, dan Beretika.	p.	Jumlah tenaga kependidikan diklat transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	3.291	Orang

Program:

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Anggaran:

Rp. 4.960.344.903.000,-

Jakarta, 21 Desember 2016.

MENTERI PERHUBUNGAN

BUDI KARYA SUMADI

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Dr. WAHJU S. UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya penyusunan Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan merupakan rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen anggaran/DIPA.

Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini sekaligus merupakan kontrak kerja yang menjadi tolok ukur akuntabilitas kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada akhir Tahun Anggaran 2016.

Semoga Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pembangunan SDM agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Jakarta, 21 DESEMBER 2016
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Dr. WAHJU SATRIO UTOMO
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19590906 198503 1 002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA (REVISI) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KATA PENGANTAR .....……. i

DAFTAR ISI ……..……. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 2
C. Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan 3

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

A. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015 - 2019 5
B. Rencana Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016..... 18

BAB III PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2016

A. Indikator Kinerja 23
B. Target Kinerja..... 26
C. Kegiatan Strategis..... 36

BAB IV PENUTUP..... 39

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA (REVISI) TAHUN 2016 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Sumber Daya Manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi agar dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas SDM sebagai pelaksananya.

Penyediaan dan pengembangan SDM di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah tanah air. Pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan dituntut peranannya untuk menyadarkan para pelaku kegiatan transportasi mengenai pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi.

Dalam rangka ikut menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang unggul dan berstandar internasional, Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.

BPSDM Perhubungan berkomitmen untuk ikut serta mewujudkan "*Road Map to Zero Accident*" dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan guna mempersiapkan SDM sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas perhubungan melalui terwujudnya SDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal. Caranya yaitu dengan mendidik insan

perhubungan di berbagai sekolah-sekolah perhubungan (UPT) di bawah naungan BPSDM Perhubungan yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 780 Kedudukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Pasal 781 adalah menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Susunan Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri dari :

a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memiliki 26 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, antara lain :

1. Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta;
3. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug;
4. Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;
5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
6. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali;
7. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang;
8. Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
9. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
10. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
11. Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya;
12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta;
13. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang;
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong;
15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong;
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh;
17. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;
18. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya;

19. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar;
20. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang;
21. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura;
22. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;
23. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi;
24. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman;
25. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan;
26. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi Bandung.

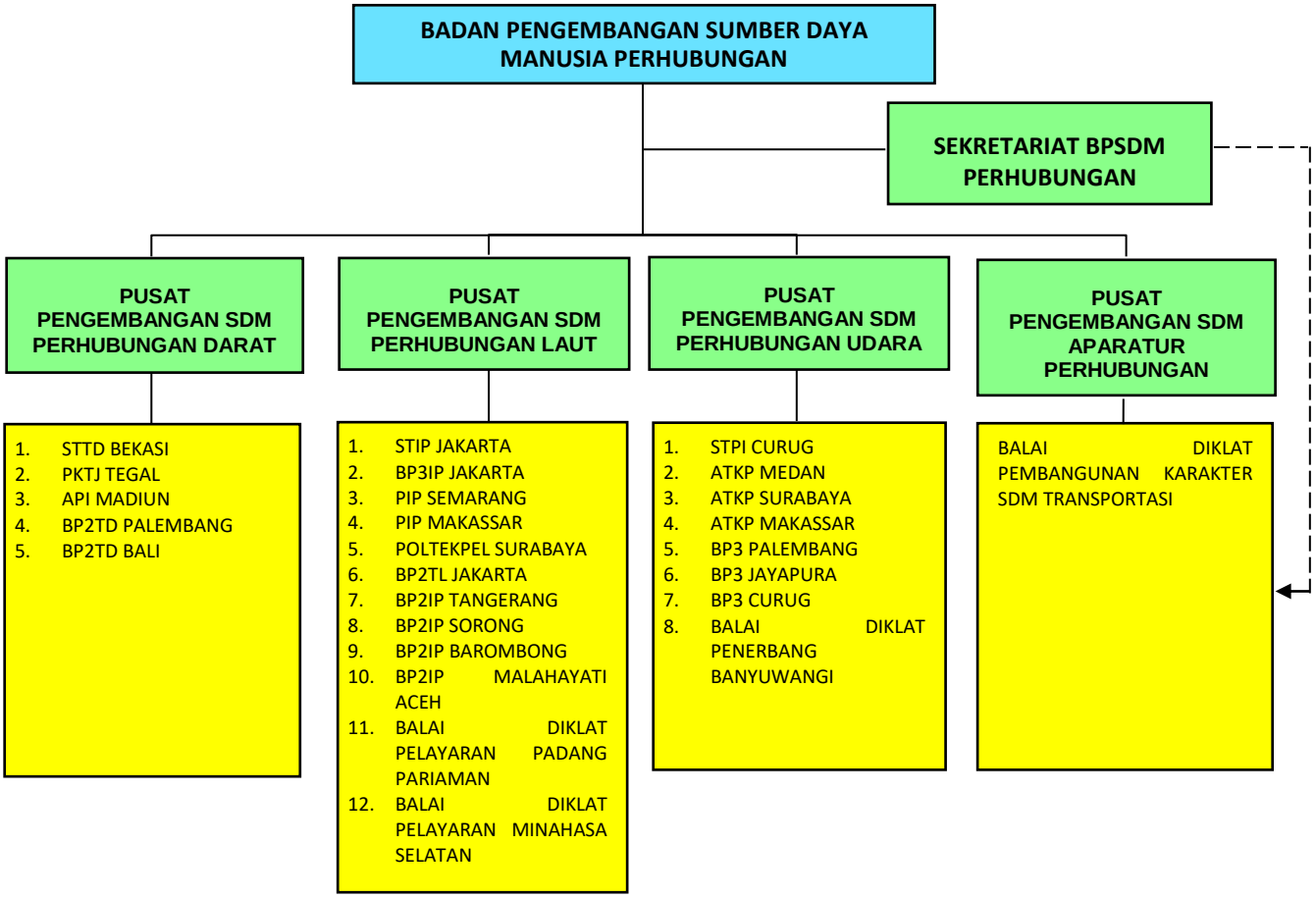

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019

A. Sasaran Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015–2019

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bahwa untuk tahun 2015-2019 tidak ada visi dan misi unit eselon I, melainkan mengikuti Visi dan Misi Presiden terpilih, Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), kemudian diturunkan menjadi Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Tingkat Eselon I.

1. Visi Dan Misi Presiden

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah: "**Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerahdan desa dalam kerangka negara kesatuan;
d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektorstrategis ekonomi domestik;
h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3. Sasaran

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 (tiga) aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

a. **Handal** diindikasi oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
b. **Berdaya saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, professional, mandiri dan produktif;
c. **Nilai Tambah** diindikasi oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereighty*) di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan tranportasi meliputi:

1) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

b. Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi meliputi:

1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

2) Terpenuhinya SDM transportasidalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4) Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6) Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

c. Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi meliputi:

1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda dan multimoda;
2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3) Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
4) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
5) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema system manajemen transportasi perkotaan.

Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019 diperoleh sasaran strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut :

"**Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan**".

4. Arah Kebijakan Dan Strategi

Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019 Badan Pengembangan SDM Perhubungan Arah kebijakan Badan

Pengembangan SDM Perhubungan yaitu "Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM di Bidang Transportasi".

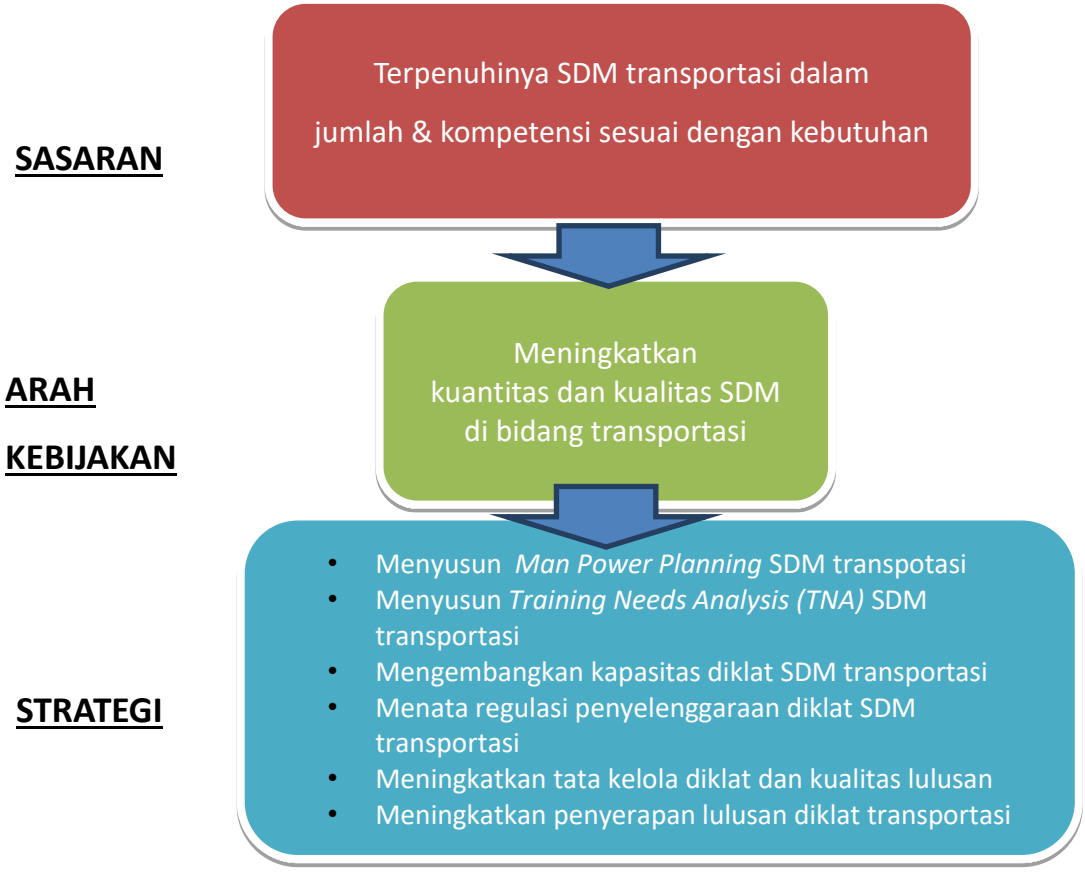

Gambar 2.1.Arah kebijakan

Rencana strategis BPSDM Perhubungan 2015-2019:

Berdasarkan Arah kebijakan di atas diperoleh strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut :

a. Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi;

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

b. Menyusun *Training Needs Analysis* (TNA) SDM Transportasi;

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan man power planning SDM Pererhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis*

c. Mengembangkan kapasitas diklat SDM Transportasi;

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan,

peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan *upgrading* skill dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, update metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi.

d. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi;

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan

strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama dengan *stakeholder,* baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Dari Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan Indikator Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan SDM Perhubungan

IKU		
SASARAN	**INDIKATOR SASARAN**	**SATUAN**
Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Psikis Yang Prima.	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang
Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional, Beretika dan berdaya saing internasional.	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang Yang Prima, Profesional, Beretika dan Berdaya saing internasional yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang
Terwujudnya Peserta Penyuluhan Transportasi yang berketertiban dan berkeselamatan.	Jumlah peserta penyuluhan Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berketertiban dan berkeselamatan yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun	orang
Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen SDM	Jumlah sistem informasi manajemen SDM traansportasi yang dibangun dan	sistem

TransportasiYang Berbasis Teknologi Informasi.	dikembangkan.	
Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	Jumlah kurikulum silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dok
Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	lembaga
Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, Pengakuan Internasional (International Recognition) Serta Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership)	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dok.
Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai
	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)
	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.	Rp.

Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional serta ramah lingkungan	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan **yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir**(Simulator, CBT, Peralatan Lab, Alat Praktek)	**Unit**
	Jumlah prasarana **baru** Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang dibangun.	m2
Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Beretika, Profesional dan Prima.	Jumlah pendidik Diklat Transportasi bersertifikat yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan psikis yang prima	Orang
	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di yang memiliki kompetensi, disiplin, integritas yang tinggi dan profesional serta didukung oleh fisik dan psikis yang prima	Orang

1. ***Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan***

   Untuk mengukur kinerja terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor: PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DI Lingkungan Kementerian Perhubungan, berikut uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan :

a. Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan;
b. Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan;
c. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi;
d. Jumlah sistem informasi yang dibangun;
e. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi;
f. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi;
g. Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi;
h. Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU);
i. Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi;
j. Nilai AKIP BPSDM Perhubungan;
k. Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan;
l. Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi;
m. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan;

n. Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir;
o. Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan; dan
p. Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.

B. Rencana Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET TAHUN 2015	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017	TARGET TAHUN 2018	TARGET TAHUN 2019
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	Orang	**245.527**	**267.858**	**269.574**	**275.816**	**286.478**
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/ kelulusan	Orang	**240.616**	**262.501**	**264.183**	**270.300**	**280.749**

c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	**361**	**385**	**391**	**401**	**413**
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	**57**	**62**	**67**	**64**	**65**
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	71	72	68	70
		6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	71	72	68	70

		7	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	**141**	**160**	**133**	**139**	**136**
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	**2** (BP2IP Barombong, BP2IP Tangerang)	**2** (ATKP Medan, STPI)	**1** (ATKP Makassar)	**0**	**0**
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga,	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	**76**	**83**	**90**	**94**	**100**

	International Recognition Serta Public Private Partnership.								
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86	87	88	89	90
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan	(%)	88	90	92	93	94
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventasisasi.	Rp.	11.681.528.642.759	11.915.159.215.614	12.153.462.399.926	12.396.531.647.925	12.644.462.280.883
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	4	4	4	4	4

i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	**2.664**	**8.686**	**2.692**	**1.996**	**1.908**
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M^2	**1.219.522**	**685.256**	**455.662**	**519.448**	**278.615**
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	**3.509**	**3.899**	**4.289**	**4.679**	**5.069**

BAB III
PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TAHUN 2016

A. Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDM Perhubungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		4
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1)	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	*Orang*
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2)	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan.	Orang
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3)	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		4
		4)	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5)	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
		6)	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
		7)	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8)	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition*	9)	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN
1		2		4
	Serta *Public Private Partnership.*			
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10)	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai
		11)	Target Penyerapan Anggaran.	%
		12)	Nilai aset yang berhasil diinventasisasi.	Rp
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13)	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14)	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit
		15)	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M^2
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16)	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang

B. Target Kinerja

Sesuai dengan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016, maka target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1		2		3	4	5
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1)	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	268.836	464.495	*Orang*
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2)	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan.	256.891	450.655	Orang
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3)	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	57	138	Dokumen
		4)	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	8	12	Sistem

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1		2		3	4	5
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5)	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	46	60	Dokumen
		6)	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	26	37	Dokumen
		7)	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	250	233	Dokumen
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8)	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	9	16	Lembaga
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* Serta *Public Private Partnership.*	9)	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	138	189	Dokumen

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		
				VOLUME		SATUAN
				SEMULA	MENJADI	
1		2		3	4	5
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10)	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	87	86	Nilai
		11)	Target Penyerapan Anggaran.	91,41	95,12	(%)
		12)	Nilai aset yang berhasil diinventasisasi.	12.999.033.852.926,-	12.211.059.603.704,-	Rp
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13)	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	36	26	Peraturan
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14)	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	8.198	2.067	Unit
		15)	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	387.244	436.604,2	M^2
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16)	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	3.628	3.291	Orang

Adapun rincian target kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 sesuai dengan Indikator Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
1.	**Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.**	**464,495**	**Orang**
	a. Jumlah target peserta Diklat Transportasi Darat, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	10,951	
	1) Peserta diklat Pembentukan	2,463	
	2) Peserta Pelatihan Teknis	8,488	
	b. Jumlah target peserta Diklat Transportasi Laut, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	429,856	
	1) Peserta diklat Pembentukan	10,205	
	2) Peserta diklat Penjenjangan/Peningkatan	12,726	
	3) Peserta Pelatihan Pemutakhiran	42,340	
	4) Peserta Pelatihan Penyegaran	107,831	
	5) Peserta Pelatihan Pengukuhan	11,280	
	6) Peserta Pelatihan Teknis	245,261	
	7) Peserta Pelatihan Lainnya	213	
	c. Jumlah target peserta Diklat Transportasi Udara, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	11,272	
	1) Peserta diklat Pembentukan	3,292	
	2) Peserta diklat Penjenjangan/Peningkatan	151	
	3) Peserta Pelatihan Teknis	7,829	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah target peserta Diklat Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan	12,416	
	1) Peserta Diklat Struktural	152	
	2) Peserta Diklat Fungsional	180	
	3) Peserta Pendidikan Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM (Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana)	66	
	4) Peserta Training/Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan	2,754	
	5) Peserta Pelatihan Teknis	4,041	
	6) Peserta Diklat Character Building	5,223	
2	**Jumlah lulusan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan**	**450,655**	**Orang**
	a. Jumlah lulusan Diklat Transportasi Darat yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	8,853	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	365	
	2) Lulusan Pelatihan Teknis	8,488	
	b. Jumlah lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	420,572	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	2,457	
	2) Lulusan diklat Penjenjangan/Peningkatan	10,531	
	3) Lulusan Pelatihan Pemutakhiran	42,219	
	4) Lulusan Pelatihan Penyegaran	107,831	
	5) Lulusan Pelatihan Pengukuhan	15,555	
	6) Lulusan Pelatihan Teknis	241,766	
	7) Lulusan Pelatihan Lainnya	213	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	c. Jumlah lulusan Diklat Transportasi Udara yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	8,856	
	1) Lulusan diklat Pembentukan	879	
	2) Lulusan diklat Penjenjangan/Peningkatan	151	
	3) Lulusan Pelatihan Teknis	7,826	
	d. Jumlah lulusan Diklat Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	12,374	
	1) Lulusan Diklat Struktural	152	
	2) Lulusan Diklat Fungsional	180	
	3) Lulusan Pendidikan Pengembangan dan peningkatan Kapasitas SDM	24	
	4) Lulusan Training/Pelatihan SDM Aparatur Perhubungan (Rintisan Pendidikan Gelar Pascasarjana)	2,754	
	5) Lulusan Pelatihan Teknis	4,041	
	6) Lulusan Diklat Character Building	5,223	
3	**Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.**	**138**	**Dokumen**
	a. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat yang berbasis teknologi informasi.	12	
	b. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Laut yang berbasis teknologi informasi.	117	
	c. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Udara yang berbasis teknologi informasi.	8	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	1	
4	**Jumlah sistem informasi yang dibangun.**	**12**	**Sistem**
	a. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Darat yang dibangun		
	b. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Laut yang dibangun		
	c. Jumlah sistem informasi Diklat Transportasi Udara yang dibangun		
	d. Jumlah sistem informasi Diklat Aparatur Perhubungan yang dibangun		
5	**Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.**	**60**	**Dokumen**
	a. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi.	4	
	b. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi.	38	
	c. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi.	18	
	d. Jumlah kurikulum Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	0	
6	**Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.**	**37**	**Dokumen**
	a. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi.	4	
	b. Jumlah silabi Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi.	15	
	c. Jumlah silabi Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi.	18	
	d. Jumlah silabi Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	0	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
7	**Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.**	**233**	**Dokumen**
	a. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Darat yang berbasis kompetensi.	4	
	b. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Laut yang berbasis kompetensi.	199	
	c. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Transportasi Udara yang berbasis kompetensi.	27	
	d. Jumlah modul/bahan ajar Diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	3	
8	**Jumlah lembaga diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).**	**16**	**Lembaga**
	1) API Madiun;		
	2) BP2TD Bali;		
	3) BP2TD Palembang;		
	4) BP2TL;		
	5) BP2IP Sorong;		
	6) BP2IP Barombong;		
	7) BP3 Palembang;		
	8) BP3 Jayapura;		
	9) BP3 Curug;		
	10) BP3 Banyuwangi;		
	11) STPI;		
	12) ATKP Makassar;		
	13) ATKP Medan;		
	14) BP2IP Tangerang;		
	15) BP2IP Malahayati Aceh;		
	16) STTD Bekasi.		

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
9	**Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang diklat transportasi.**	**189**	**Dokumen**
	a. Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Darat.	36	
	b. Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Laut.	109	
	c. Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Udara.	31	
	d. Jumlah dokumen kerjasama diklat transportasi Aparatur Perhubungan.	13	
10	**Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.**	**86**	**Nilai**
11	**Target Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan**	**95,12**	**(%)**
12	**Nilai Aset yang berhasil diinventarisasi.**	**12,211,059,603,704**	**Rp**
13	**Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi yang dihasilkan.**	**26**	**Peraturan**
	a. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi Darat yang dihasilkan.	0	
	b. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi Laut yang dihasilkan.	15	
	c. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM transportasi Udara yang dihasilkan.	0	
	d. Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di bidang SDM Aparatur Perhubungan yang dihasilkan.	11	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
14	**Jumlah sarana diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.**	**2067**	**Unit**
	a. Jumlah sarana diklat transportasi darat yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	172	
	b. Jumlah sarana diklat transportasi Laut yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	1,074	
	c. Jumlah sarana diklat transportasi Udara yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	821	
	d. Jumlah sarana diklat Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir.	0	
15	**Jumlah prasarana diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan.**	**436604.2**	**m2**
	a. Jumlah prasarana diklat transportasi darat	111,320	
	b. Jumlah prasarana diklat transportasi Laut	147,859	
	c. Jumlah prasarana diklat transportasi Udara	161,305	
	d. Jumlah prasarana diklat transportasi Aparatur Perhubungan	16,120	
16	**Jumlah tenaga kependidikan diklat transportasi di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.**	**3,291**	**Orang**
	a. Jumlah tenaga kependidikan diklat transportasi Darat di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	440	
	b. Jumlah tenaga kependidikan diklat transportasi Laut di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	1659	
	c. Jumlah tenaga kependidikan diklat transportasi Udara di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	1074	

INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		VOLUME	SATUAN
(1)		(2)	(3)
	d. Jumlah tenaga kependidikan diklat Aparatur Perhubungan di lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	118	

Total pagu awal Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada DIPA Tahun Anggaran 2016 adalah **Rp. 5.630.499.425.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Persumber dana:
  - **RM : Rp. 4.474.575.302.000,-**
  - **PNBP : Rp. 69.919.877.000,-**
  - **BLU : Rp. 1.086.004.246.000,-**
- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:
  - **Belanja Pegawai : Rp. 346.172.838.000,-**
  - **Belanja Barang : Rp. 2.582.227.160.000,-**
  - **Belanja Modal : Rp. 2.702.099.427.000,-**

C. Kegiatan Strategis

Adapun kegiatan Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2016, sebagai berikut:

1. **Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat :**

   Lanjutan Pembangunan BPPTD Mempawah Tahap IV dan Pengadaan peralatan/fasilitas diklat BPPTD Mempawah.

2. **Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut :**

   a) Lanjutan Pembangunan BP2IP Padang Pariaman Tahap V, BP2IP Minahasa Selatan Tahap IV;

   b) Pembangunan Kampus Baru BP2IP Ambon dan NTT;

c) Pengadaan peralatan dan fasilitas diklat BP2IP Padang Pariaman dan BP2IP Minahasa Selatan.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara :

a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama, gedung laboratorium dan pengadaan fasilitas diklat di BPPP Palembang;
b) Renovasi Asrama D, pekerjaan konstruksi jalan masuk, talud dan pagar di BPPP Jayapura;
c) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat, pembuatan jalan dan taman di BPPP Curug.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan :

a) Renovasi gedung bangunan di Pusbang SDM Aparatur Perhubungan.
b) Lanjutan Pembangunan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahap IV dan pengadaan fasilitas diklat.

5. Pendidikan Perhubungan Darat :

a) Lanjutan Pembangunan gedung asrama di STTD Bekasi, Laboratorium Nautika dan Teknika di BP2TD Palembang, asrama dan kelas di PKTJ Tegal Tahap V;
b) Lanjutan Pembangunan Kampus BP2TD Bali Tahap II dan Kampus Akademi Perkeretaapian Tahap VI.

6. Pendidikan Perhubungan Laut :

a) Pengadaan peralatan diklat, GMDSS di STIP dan Renovasi gedung kelas, labotarium dan gedung utama di BP2IP Sorong;
b) Lanjutan Pembangunan gedung serba guna, asrama dan kelas di PIP Semarang, Kampus Terpadu PIP Makassar Tahap VII dan gedung asrama, kelas dan talud di BP2IP Malahayati-Aceh Besar.
c) Lanjutan Pembangunan kapal latih (Multiyears) di STIP, PIP Makassar dan Poltekpel Surabaya.

7. **Pendidikan Perhubungan Udara :**
   a) Lanjutan Pengadaan pesawat latih (Multiyears) di STPI dan Pengadaan Peralatan Diklat di ATKP Medan;
   b) Lanjutan Pembangunan sarana dan prasarana diklat di ATKP Surabaya dan Kampus Terpadu ATKP Makassar Tahap IV.

8. **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat BPSDMP :**

   Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar BPSDMP dan Aparatur Kementerian Perhubungan.

BAB IV
P E N U T U P

Bahan masukan Penetapan Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini disusun berdasarkan 10 Sasaran Strategis dengan 16 Indikator Kinerja beserta targetnya yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran setelah dikurangi *self blocking* sebesar Rp. 4.960.344.903.000,-

Dengan sasaran strategis, indikator kinerja beserta target tersebut di atas diharapkan mampu mewujudkan sasaran dan tujuan program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang merupakan tugas dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Demikian Penetapan Kinerja (Revisi) Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang akan dilaksanakan dan dijadikan tolak ukur keberhasilan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.